

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUNDJUNG ISWANDARU
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 902083

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 517.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1,5L SPORT 4X2 AT MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL 2,0 L MT MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, BENELI BENELI SPORT BS 150 RB MT Tahun 2018, HADIAH Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA NF 100 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
5. MOTOR, KAWASAKI EX 250 J Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
6. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1,5 RS CVT CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 191.460.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 874.333.121



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.533.293.121
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.533.293.121

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.